

**TAHUN
2023**



LAPORAN KEUANGAN BPBD DIY AUDITED



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan Kenari No.14 A, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta

Telp. 0274-555836 Fax. 0274-555842

<http://www.bpbd.jogjaprov.go.id>

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, kami atas nama BPBD DIY menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023. Laporan Keuangan BPBD DIY Tahun Anggaran 2023 disusun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 99 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Secara singkat Laporan Keuangan BPBD DIY Tahun Anggaran 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI APBD

Laporan Realisasi APBD menggambarkan perbandingan antara APBD Tahun Anggaran 2023 dengan realisasi yang mencakup unsur unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :

A. Pendapatan ditetapkan sebesar	Rp0,00
Realisasinya mencapai sebesar	Rp0,00
Sehingga kurang dari target sebesar	Rp0,00
Atau sebesar 0%	
B. Belanja ditetapkan sebesar	Rp22.331.969.211,00
Realisasinya mencapai sebesar	Rp21.446.824.199,00
Sehingga kurang dari target sebesar	Rp885.145.012,00
Atau sebesar 3,96%	
C. Suplus/Defisit Anggaran ditetapkan defisit sebesar Rp(22.331.969.211,00) dengan realisasi defisit sebesar Rp(21.446.824.199,00) atau sebesar 96,04%	

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan BPBD DIY mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada 31 Desember 2023.

Jumlah Aset 31 Desember 2023 sebesar	Rp23.554.983.121,31
Yang terdiri dari Aset Lancar sebesar	Rp3.332.529.816,35
Investasi Jangka Panjang sebesar	Rp0,00
Persediaan	Rp3.332.529.816,35

Aset tetap sebesar	Rp19.827.953.304,96
Dana Cadangan sebesar	Rp0,00
Dan Aset lainnya sebesar	Rp394.500.000,00
Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar	Rp43.490.722,00
Yang terdiri dari Kewajiban jangka pendek sebesar	Rp43.490.722,00
serta dari Kewajiban jangka panjang sebesar	Rp0,00
Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar	Rp60.805.211.959,44

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber data ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh BPBD DIY untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan terdiri dari Pendapatan-LO, beban, Transfer dan Pos-pos Luar Biasa, dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan LO terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah LO	Rp0,00
Pendapatan Transfer LO	Rp0,00
Lain lain Pendapatan yang sah LO	Rp937.428.984,00
Pendapatan Luar Biasa-LO	Rp0,00

Beban terdiri dari :

Beban Operasi	Rp22.689.350.042,49
Beban Penyusutan	Rp3.546.213.478,54
Surplus/Defisit Operasional	Rp(25.298.134.537,03)
Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp(25.298.134.537,03)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

Ekuitas Awal	Rp27.405.488.989,34
Surplus Laporan Operasional	Rp(25.298.134.537,03)
RK PPKD	Rp21.446.824.199,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar	Rp(42.686.252,00)
Ekuitas Akhir	Rp23.511.492.399,31

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) menguraikan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan, kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai serta peristiwa penting setelah tanggal pelaporan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan menggunakan basis kas yaitu pada saat diterima dan dikeluarkan oleh dan dari kas daerah. Sementara dalam penyajian Neraca dan Laporan Operasional pengakuan Aset, kewajiban, Ekuitas, pendapatan LO, beban dan Transfer menggunakan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima dan dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan BPBD DIY Tahun Anggaran 2023 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharap tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholder*).

Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan yang transparan, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) serta tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 16 April 2024

Kepala Pelaksana

Drs. NOVIAR RAHMAD, M.Si.

NIP. 197011161990031001

DAFTAR ISI

	Halaman
1. JUDUL.....	i
2. KATA PENGANTAR.....	ii
3. DAFTAR ISI.....	v
4. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	vi
5. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	vii
6. LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	viii
7. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE).....	ix
8. NERACA.....	x
9. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
BAB II IKHTIAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	8
BAB III PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN.....	13
BAB IV PENUTUP.....	32
 LAMPIRAN	
A. Lampiran Neraca	
1. Kertas Kerja Penyusutan Laporan keuangan SKPD	
2. Berita Acara Penutupan Kas	
3. Register Penutupan Kas	
4. Berita Acara Stock Opname Persediaan	
5. Kertas Kerja Aset Tetap dan Aset Lainnya	
6. Laporan Mutasi Persediaan	



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Kenari No.14 A Telepon: (0274) 555836, 555585, Fax.(0274) 555326
YOGYAKARTA 55166

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagai terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Yogyakarta, 16 April 2024

Kepala Pelaksana

Drs. NOVIAR RAHMAD, M.Si.

NIP. 197011161990031001

**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
(CALK)**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
5. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BPBD DIY diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan BPBD DIY:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 9);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 32);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 56) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 46);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 57);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 30);
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 113) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 33);

29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 71);
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 104);
31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 44) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 53).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

- 3.1 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD
 - 3.1.1 Pendapatan-LRA
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.3 Aset
 - 3.1.4 Kewajiban
 - 3.1.5 Ekuitas

3.1.6 Pendapatan-LO

3.1.7 Beban

3.1.8 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan Atas Informasi-Informasi Nonkeuangan SKPD

Bab V Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang)	Prosentase	
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	
BPBD DIY					
PENDAPATAN		937.428.948,00,00	937.428.948,00	0,00	%
Pendapatan Asli Daerah					
Hasil Retribusi Daerah					
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO		937.428.948,00	937.428.948,00	0,00	%
BELANJA	22.331.969.211,00	21.446.824.199,00	885.145.012,00	96,04	%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.590.000,00	29.477.250,00	19.147.500,00	60,67	%
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	31.375.000,00	31.367.000,00	8.000,00	99,98	%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.775.900,00	51.659.700,00	116.200,00	99,78	%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.726.325.164,00	9.636.109.478,00	90.215.686,00	99,08	%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.600.000,00	42.120.000,00	480.000,00	98,88	%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.374.600,00	9.374.600,00	0,00	100,00	%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	21.245.000,00	21.245.000,00	0,00	100,00	%

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang)	Prosentase	
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.500.00,00	21.250.000,00	1.250.000,00	94,45	%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.526.000,00	18.515.100,00	10.900,00	99,95	%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.984.900,00	35.976.433,00	8.467,00	99,98	%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.399.500,00	41.399.500,00	0,00	100,00	%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.162.000,00	5.300.400,00	861.600,00	86,02	%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	268.756.000,00	268.676.118,00	79.882,00	99,97	%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.557.000,00	56.050.000,00	507.000,00	99,11	%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	523.785.200,00	470.453.382,00	53.331.818,00	89,82	%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	883.681.00,00	875.332.442,00	8.348.558,00	99,06	%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	141.140.000,00	132.072.000,00	9.068.000,00	93,58	%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	303.360.200,00	286.282.200,00	17.078.000,00	94,37	%

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang)	Prosentase	
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	231.440.400,00	219.002.600,00	1.243.800,00	94,63	%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	100,00	%
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	114.761.400,00	96.766.400,00	17.995.000,00	84,32	%
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	1.495.334.000,00	1.458.269.600,00	37.064.400,00	97,52	%
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	53.943.500,00	41.889.500,00	12.054.000,00	77,66	%
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	181.350.700,00	149.352.700,00	31.998.000,00	82,36	%
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	837.650.200,00	807.528.172,00	30.122.028,00	96,41	%
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	1.089.365.300,00	1.025.667.146,00	63.698.154,00	94,16	%
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1.163.516.800,00	1.113.021.641,00	50.495.159,00	95,66	%
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	1.088.208.600,00	959.876.780,00	128.331.820,00	88,21	
Respon Cepat Penanganan	203.966.700,00	164.840.900,00	39.125.800,00	80,82	%

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang)	Prosentase	
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	
Darurat Bencana					
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.299.539.447,00	1.195.426.804,00	104.112.643,00	97,15	%
Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	74.475.100,00	70.030.050,00	4.445.050,00	94,04	%
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	92.542.700,00	87.067.700,00	5.475.000,00	94,09	%
Penanganan Pasca Bencana Provinsi	251.438.600,00	160.060.700,00	91.377.900,00	63,66	%
Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	87.267.000,00	85.267.000,00	2.000.000,00	97,71	%
Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	231.149.000,00	231.149.000,00	0,00	100,00	%
Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	1.482.932.300,00	1.429.107.103,00	53.825.197,00	96,37	%

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BPBD DIY sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan 4 program, 14 kegiatan, dan 36 sub kegiatan. Total belanja menurut program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp22.331.969.211,00 terealisasi sebesar Rp21.446.824.199,00 atau 96,04%. Secara umum pelaksanaan belanja daerah dan kinerja dapat dicapai dengan baik. Namun ada kendala yg dihadapi terhadap penyerapan anggaran sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp885.145.012,00 atau 3,96%. Hal tersebut dikarenakan:

- a. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dianggarkan sebesar Rp6.162.000,00 terealisasi sebesar Rp5.300.400,00 atau 86,02% karena penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik dianggarkan sebesar Rp523.785.200,00 terealisasi sebesar Rp470.453.382,00 atau 89,82% karena pembayaran disesuaikan dengan tagihan listrik, air, dan telepon BPBD DIY.
- c. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi dianggarkan sebesar Rp114.761.400,00 terealisasi sebesar Rp96.766.400,00 atau 84,32% karena terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp17.995.000,00.
- d. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dianggarkan sebesar Rp53.943.500,00 terealisasi sebesar Rp41.889.500,00 atau 77,66% karena terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp13.554.000,00.
- e. Pelatihan Pencegahan Mitigasi Bencana dianggarkan sebesar Rp181.350.700,00 terealisasi sebesar Rp149.352.700,00 atau 82,36% karena terdapat rasionalisasi dan efisiensi anggaran tahun 2023. Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) yang semula dijadwalkan bulan April menyesuaikan agenda kegiatan ASEAN Regional Disaster Response Simulation Exercise (ARDEX) Tahun 2023 yang dipusatkan di DIY pada bulan Agustus 2023. Selain itu menyesuaikan jadwal dengan melakukan koordinasi jadwal pelatihan DMB dengan Pusdiklat PB BNPB untuk penyesuaian jadwal narasumber.
- f. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana dianggarkan sebesar Rp203.966.700,00 terealisasi sebesar Rp164.840.900,00 atau 80,82% karena kegiatan FGD Posko Siaga Bencana Hidrometeorologi baru bisa terealisasi pada bulan Desember. Selain itu kegiatan penanganan bencana disesuaikan dengan kondisi wilayah DIY.
- g. Penanganan Pasca Bencana Provinsi dianggarkan sebesar Rp251.438.600,00 terealisasi sebesar Rp160.060.700,00 atau 63,66% karena tidak ada kejadian pasca bencana yang menjadi kewenangan provinsi sehingga beberapa kegiatan pasca bencana menyesuaikan dengan kebutuhan.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BPBD DIY

3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

	2023	2022
1.1 <u>Pendapatan-LRA</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Pendapatan-LRA BPBD DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau 100,00 %

3.1.2 <u>Belanja</u>	<u>Rp21.446.824.199,00</u>	<u>Rp24.921.956.599,00</u>
-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Belanja BPBD DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp22.331.969.211,00 dengan realisasi sebesar Rp21.446.824.199,00 atau 96,04% Rincian realisasi belanja terdiri dari:

3.1.2.1 <u>Belanja Operasi</u>	<u>Rp21.278.701.199,00</u>	<u>Rp24.650.066.606,00</u>
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Belanja Operasi BPBD DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp22.162.387.611,00 dan realisasi sebesar Rp21.278.701.199,00 atau 96,01%, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.2.1.1 <u>Belanja Pegawai</u>	<u>Rp9.699.479.478,00</u>	<u>Rp9.796.930.608,00</u>
---	----------------------------------	----------------------------------

Belanja Pegawai BPBD DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp9.791.425.164,00 dan realisasi sebesar Rp9.699.479.478,00 atau 99,06%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.342.623.208,00	5.314.346.128,00	99,47
a.	Belanja Gaji Pokok ASN	4.323.258.154,00	4.315.300.224,00	99,82
b.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	237.343.904,00	236.561.376,00	99,67
c.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	163.438.000,00	145.570.000,00	89,07
d.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	119.000.000,00	119.000.000,00	100,00
e.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	62.350.000,00	62.235.000,00	99,82
f.	Belanja Tunjangan Beras ASN	125.793.540,00	125.793.540,00	100,00
g.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.959.172,00	11.885.184,00	99,38

h	Belanja Pembulatan Gaji ASN	31.885,00	29.902,00	93,78
i	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	271.893.266,00	270.523.712,00	99,50
j	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.863.051,00	8.810.280,00	99,40
k	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	18.692.236,00	18.636.910,00	99,70
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.383.701.956,00	4.321.763.350,00	98,59
a.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.177.322.651,00	2.147.792.050,00	98,64
b.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.206.379.305,00	2.173.971.300,00	98,53
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	65.100.00,00	63.370.000,00	97,34
a.	Belanja Honorarium	42.600.000,00	42.120.000,00	98,87
b.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	22.500.000,00	21.250.000,00	94,44
	Jumlah Belanja Pegawai-LRA	9.791.425.164,00	9.699.479.478,00	99,06

3.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Rp10.441.790.721,00

Rp12.865.128.635,00

Belanja Barang dan Jasa BPBD DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp11.196.763.847,00 dan realisasi sebesar Rp10.441.790.721,00 atau 93,26%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Barang Pakai Habis	3.685.166.100,00	3.484.066.315,00	94,54
2.	Belanja Jasa kantor	4.762.305.047,00	4.461.540.815,00	93,68
3.	Belanja Sewa Tanah	41.409.600,00	30.160.000,00	72,83
4.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	92.066.700,00	75.708.000,00	82,23
5.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	256.525.400,00	193.417.000,00	75,40
6.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.037.600,00	1.360.000,00	66,75
7.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	229.215.000,00	229.215.000,00	100,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
8.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	585.468.600,00	557.288.465,00	95,19
9.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	70.000.000,00	68.995.405,00	98,56
10.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.433.800,00	21.400.000,00	99,84
11.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.451.136.000,00	1.318.639.721,00	90,87
12.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.123,298.600,00	1.112.147.000,00	99,01
13.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	50.900.000,00	25.284.000,00	49,67
	Jumlah	11.196.763.847,00	10.485.263.221,00	93,65%

Terdapat Belanja Barang Pakai Habis yang tidak menjadi persediaan. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga merupakan Belanja Bansos dengan kegiatan pensertifikatan Tanah Huntap. Kegiatan yang sudah selesai dilakukan pada Tahun 2023 berupa pengukuran Tanah Huntap. Melihat dari kegiatan tersebut maka sejumlah Rp20.804.000,00 dari Belanja Bansos direklasifikasi menjadi Belanja Jasa Pengukuran Tanah.

Dari Belanja Hibah diatas rincian penerima hibah sebagai berikut:

1	FPRB Hargobinangun	Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa
2	FPRB Kalurahan Ambarketawang	Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa
3	FPRB Kalurahan Bangunkerto	Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa
4	FPRB Kalurahan Candibinangun	Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa
5	FPRB Kalurahan Kalitirto	Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa
6	FPRB Kalurahan Margodadi	Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa
7	FPRB Kalurahan Margorejo	Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa
8	FPRB Kalurahan Merdikorejo	Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa

9	FPRB Kalurahan Muja Muju	Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa
10	FPRB Kalurahan Notoprajan	Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa
11	FPRB Kalurahan Purwobinangun	Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa
12	FPRB Kalurahan Sariharjo	Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa
13	FPRB Kalurahan Sendangtirto	Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa
14	FPRB Kalurahan Srimartani	Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa
15	FPRB Kalurahan Wiladeg	Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa
16	FPRB Kalurahan Bausasran	Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa
17	FPRB Kalurahan Brontokusuman	Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa
18	FPRB Kalurahan Gedongkiwo	Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa
19	FPRB Kalurahan Giwangan	Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa
20	FPRB Kalurahan Mantrijeron	Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa
21	FPRB Kalurahan Ngampilan	Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa
22	FPRB Kalurahan Purbayan	Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa
23	FPRB Kalurahan Sosromenduran	Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa
24	FPRB Kalurahan Suryatmajan	Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa
25	FPRB Kalurahan Warungboto	Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa
26	Kelompok Tagana Kecamatan Keraton	Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa
27	KTB Lowanu	Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa
28	MAS ALI MAKSUM	Denah Jalur Evakuasi, Papan Nama SPAB, Rambu Titik Kumpul, Rambu Jalur Evakuasi, Piagam SPAB,
29	SLB CITRA MANDIRI	Denah Jalur Evakuasi, Papan Nama SPAB, Rambu Titik Kumpul, Rambu Jalur Evakuasi
30	SMAS BOPKRI 1	Denah Jalur Evakuasi, Papan Nama SPAB, Rambu Titik Kumpul, Rambu Jalur Evakuasi, Piagam SPAB

Rincian penerima bantuan sosial sebagai berikut:

1	Tumijo	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
2	Riyadi	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
3	Ngadirin	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
4	Sri Sutarmi	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
5	Sugi/ Suprpto	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
6	Ny. Saulani	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
7	Parwoto	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
8	Yhani Sugandhi	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
9	Mlnto Wiyono	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
10	Untung	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
11	Wahono	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
12	Minder Lestari	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
13	Miskam	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
14	Narto Wiyono	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
15	Lagiyo/ Warno Wiyono	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
16	Jamiarto	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
17	Supandi	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
18	Jiyono	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
19	Jeminem	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
20	Sabar	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
21	Levi Catur Pertiwi	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
22	Muji Kariyo	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap

23	Tukijo	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
24	Ngatini	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
25	Tejo Wiyono	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
26	Suyadi	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
27	Basuki	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
28	Trisno Widodo	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
29	Hadi Utomo	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
30	Sokiran	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
31	Warsihono	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
32	Eko Prihono	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
33	Ngadiran	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
34	Jarwo Sriyanto	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
35	Muji Wiyono	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
36	Suharjo	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
37	Wadi Suwatno/Wolo Sukarno	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
38	Saridi	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
39	Sumarno/Jemirah	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
40	Harji Susanto/Ngatijo	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
41	Warto Pawiro	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
42	Giyono	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
43	Hadi Sutrisno	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
44	Selari	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap

Kegiatan Bantuan Sosial yang meliputi Pensertifikatan Tanah Huntap pada Tahun 2023 baru mencapai tahap pengukuran tanah. Kegiatan selanjutnya direncanakan akan diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya

3.1.2.2 Belanja Modal Rp168.123.000,00 Rp271.889.993,00

Belanja Modal BPBD DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp169.581.600,00 dan realisasi sebesar Rp168.123.000,00 atau 99,14%, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah Rp0,00 Rp0,00

Belanja Modal Tanah BPBD DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0
	Jumlah	0,00	0,00	

Belanja Modal Tanah tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Tanah sebesar Rp0,00

3.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp168.123.000,00 Rp271.889.993,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BPBD DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp169.581.600,00 dan realisasi sebesar Rp168.123.000,00 atau 99,14%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	107.524.600,00	107.340.000,00	99,83
3.	Belanja Modal Komputer	62.057.000,00	60.783.000,00	97,95
	Jumlah	<u>169.581.600,00</u>	<u>168.123.000,00</u>	<u>99,14</u>

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp168.123.000,00

3.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0,00 Rp0,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BPBD DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	-

	Jumlah	0,00	0,00	-
--	---------------	-------------	-------------	----------

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 0,00 dan dicatat ekstrakomtabel sebesar Rp0,00

3.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan **Rp0,00** **Rp0,00**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BPBD DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	<u>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</u>	0,00	0,00	-
	Jumlah	0,00	0,00	-

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp0,00 dan dicatat ekstrakomtabel sebesar Rp0,00.

3.1.3 Aset

Aset BPBD DIY per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.554.983.121,31 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp3.332.529.816,35 Aset Tetap sebesar Rp19.827.953.304,96 dan Aset Lainnya sebesar Rp394.500.00,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
3.1.3.1 <u>Aset Lancar</u>	<u>Rp3.332.529.816,35</u>	<u>Rp3.842.392.693,84</u>

Aset Lancar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.332.529.816,35 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.3.1.1 <u>Kas dan Setara Kas</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>
--	----------------------	----------------------

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00

3.1.3.1.5 <u>Persediaan</u>	<u>Rp3.332.529.816,35</u>	<u>Rp3.842.392.693,84</u>
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.332.529.816,35 dengan rincian sebagai berikut

No	<u>Uraian</u>	2023
1.	Bahan Bangunan dan Konstruksi	14.566.325,00
2.	Bahan Kimia	4.816.700,00
3.	Bahan Bakar dan Pelumas	232.525.000,00
4.	Bahan Lainnya	205.300.556,13
5.	Alat Tulis Kantor	11.790.750,00
6.	Kertas dan Cover	9.117.502,00
7.	Bahan Cetak	9.962.500,00
8.	Benda Pos	1.350.000,00
10.	Bahan Komputer	419.200,00
11.	Perabot Kantor	55.674.761,00
12.	Alat Listrik	13.496.880,00
13.	Perlengkapan Dinas	6.950.000,00
14.	Perlengkapan Pendukung Olahraga	9.850.500,00
15.	Suvenir/Cendera Mata	1.650.000,00
16.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	216.023.190,22
17.	Obat	27.786.958,00
18.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	47.757.692,00
19.	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	18.890.127,00
20.	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	2.443.601.175,00
	Jumlah	

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah persediaan sebesar Rp937.428.984.00 yang berasal dari hibah BNPB dicatat sebagai Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya. Selain itu terdapat mutasi tambah persediaan sebesar Rp3.531.110.915,00 yang berasal dari Belanja Barang Pakai Habis

b. Mutasi kurang

Mutasi Kurang Persediaan berupa reklas ke Beban Jasa Pengukuran Tanah yang berasal dari Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp20.804.000,00. Selain itu terdapat pengurangan persediaan berupa mutasi keluar ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY sebesar Rp3.889.252,00 dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY sebesar Rp38.797.000,00.

3.1.3.2 Aset Tetap

Rp19.827.953.304,96

Rp23.206.033.783,50

Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp19.827.953.304,96 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.3.2.1. Peralatan dan Mesin**Rp46.472.370.577,67****Rp46.304.247.577,67**

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp46.472.370.577,67 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

c. Mutasi tambah

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp168.123.000,00 berasal dari belanja modal Rp168.123.000,00 yang terdiri dari penambahan Alat Pengangkat Rp7.450.000,00; Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Rp99.890.000,00; Personal Komputer Rp56.050.000,00; Peralatan Personal Komputer Rp4.733.000,00.

d. Mutasi kurang

Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp0,00.

e. Hibah/Bantuan

Hibah/Bantuan sebesar Rp0,00.

f. Ekstrakomtabel

Peralatan dan Mesin Tahun 2023 yang disajikan sebagai aset ekstrakomtabel adalah sebesar Rp0,00.

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp Rp46.472.370.577,67 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023
1.	Alat Besar	Rp3.477.365.918,00
2.	Alat Angkutan	Rp19.253.054.324,00
3.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp273.847.000,00
4.	Alat Pertanian	Rp145.500.000,00
5.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp3.570.447.547,00
6.	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp13.118.496.651,00
7.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp647.417.951,94
8.	Alat Laboratorium	Rp525.221.913,73
9.	Alat Persenjataan	Rp600.348.400,00
10.	Komputer	Rp1.949.623.894,00
11.	Alat Keselamatan Kerja	2.231.825.300,00
12.	Rambu-rambu	Rp80.175.000,00
13.	Peralatan Olahraga	Rp599.046.675,00
	Jumlah	Rp46.472.365.918,00

3.1.3.2.3 Gedung dan Bangunan**Rp9.308.799.350,00****Rp9.308.799.350,00**

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.308.799.350,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,00.

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,00.

c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah Gudang dan Bangunan sebesar Rp0,00.

d. Ekstrakomtabel

Hasil pengadaan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 yang disajikan sebagai aset ekstrakomtabel adalah sebesar Rp0,00.

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp9.308.799.350,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023
1	Bangunan Gedung Kantor	Rp7.469.930.950,00
2	Bangunan Gedung Instalasi	Rp54.910.000,00
3	Bangunan Tempat Ibadah	Rp57.333.000,00
4	Bangunan Gedung Garasi/Pool	Rp1.726.625.400,00
	Jumlah	Rp9.308.799.350,00

3.1.3.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**Rp6.638.348.700,00****Rp6.638.348.700,00**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.638.348.700,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp0,00.

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp0,00.

c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah sebesar Rp0,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp6.638.348.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023
1.	Jalan dan Jembatan	Rp1.485.268.000,00
2.	Bangunan Air	Rp419.397.900,00
3.	Instalasi	Rp4.406.182.000,00
4.	Jaringan	Rp327.500.800,00
	Jumlah	<u>Rp6.638.348.700,00</u>

3.1.3.2.5 Aset Tetap Lainnya

Rp419.145.000,00

Rp419.145.000,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp419.145.000,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00.

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00 berasal dari Aset Tetap Renovasi.

c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah sebesar Rp0,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp419.145.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023
1.	Bahan Perpustakaan	Rp54.528.000,00
2.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	Rp24.940.000,00
3	Aset Tetap Renovasi	Rp339.677.000,00
	Jumlah	<u>Rp419.145.000,00</u>

3.1.3.2.7 Akumulasi Penyusutan**Rp(43.010.710.322,71)****Rp(39.464.496.844,17)**

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp(43.010.710.322,71) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp(30.307.307.567,79)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp(1.991.271.851,00)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp(1.712.130.903,92)
	Jumlah	Rp(43.010.710.322,71)

3.1.3.3 Aset Lainnya**Rp394.500.000,00****Rp394.500.000,00**

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp394.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

3.1.3.3.1 Aset Tak Berwujud**Rp394.500.000,00****Rp394.500.000,00**

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp394.500.000,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Aset Tak Berwujud sebesar Rp10.000.000,00 pada Aset Rusak Berat/Usang dan Rp10.000.000,00 pada Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang.

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Aset Tak Berwujud sebesar Rp0,00.

c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah sebesar Rp0,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp394.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Software	Rp20.000.000,00
2	Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp374.500.000,00
3	Aset Rusak Berat/Usang	Rp10.000.000,00

4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	Rp(10.000.000,00)
	Jumlah	<u>Rp394.500.000,00</u>

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp394.500.000,00.

3.1.3.3.4 Aset Lain-lain **Rp0,00** **Rp0,00**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp555.883.382,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah
Mutasi tambah Aset Lain-lain Rp0,00.
- b. Mutasi kurang
Mutasi kurang Aset Lain-Lain sebesar Rp0,00.
- c. Penerimaan hibah
Penerimaan hibah sebesar Rp0,00.

3.1.4 Kewajiban **Rp43.490.722,00** **Rp37.447.488,00**

Kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp43.490.722,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.4.1 Kewajiban Jangka Pendek **Rp43.490.722,00** **Rp37.447.488,00**

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp43.490.722,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.4.1.1 Utang Belanja **Rp43.490.722,00** **Rp37.447.488,00**

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 merupakan kewajiban atas layanan barang/jasa yang telah dikonsumsi oleh SKPD namun sampai dengan dengan per 31 Desember 2023 belum dibayar oleh SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Utang Belanja Jasa	Rp43.490.722,00
a.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	Rp410.452,00
b.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	Rp67.500,00
c.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	Rp43.012.770,00
	Jumlah	<u>Rp43.490.722,00</u>

1.5 Ekuitas**Rp23.511.492.399,31****Rp27.405.488.989,34**

Saldo Ekuitas sebesar Rp23.511.492.399,31 merupakan kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban SKPD pada tanggal 31 Desember 2023. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
	Ekuitas awal	Rp27.405.488.989,34
	Surplus Defisit – LO	Rp(25.298.134.537,03)
	Ekuitas Dikonsolidasikan:	
	RK PPKD	Rp21.446.824.199,00
	Jumlah	Rp23.511.492.399,31

2023**2022****3.1.6 Pendapatan-LO****Rp937.428.984,00****Rp3.714.835.593,00**

Pendapatan LO Tahun 2023 sebesar Rp937.428.984,00 meliputi Pendapatan Retribusi-LO sebesar Rp0,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp937.428.984,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.6.1 Pendapatan Hibah-LO**Rp937.428.984,00****Rp3.714.835.593,00**

Pendapatan Hibah-LO pada Tahun 2023 sebesar Rp937.428.984,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO	Rp937.428.984,00
	Jumlah	Rp937.428.984,00

Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO pada Tahun 2023 sejumlah Rp937.428.984,00. Pendapatan tersebut berasal dari Hibah BNPB berupa Persediaan untuk Tujuan Strategis Berjaga-Jaga Lainnya.

2023

2022

3.1.7 **Beban**

Rp26.235.563.521,03

Rp41.964.508.430,46

Realisasi Beban BPBD DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp26.235.563.521,03 adalah penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.7.1 **Beban Operasi**

Rp22.689.350.042,49

Rp29.659.003.052,36

Realisasi Beban Operasi BPBD DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp22.689.350.042,49 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp9.699.479.478,00; Beban Barang dan Jasa sebesar Rp11.877.723.564,49 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.7.1.1 **Beban Pegawai**

Rp9.699.479.478,00

Rp9.979.930.608,00

Realisasi Beban Pegawai BPBD DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.699.479.478,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	Rp5.314.346.128,00
a.	Beban Gaji Pokok ASN	Rp4.315.300.224,00
b.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	Rp236.561.376,00
c.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	Rp145.570.000,00
d.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	Rp119.000.000,00
e.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp62.235.000,00
f.	Beban Tunjangan Beras ASN	Rp125.793.540,00
g.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp11.885.184,00
h.	Beban Pembulatan Gaji ASN	Rp29.902,00
i.	Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	Rp270.523.712,00
j.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp8.810.280,00
k.	Beban luran Jaminan Kematian ASN	Rp18.636.910,00
	Jumlah	Rp5.314.346.128,00

2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	Rp4.321.763.350,00
a.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp2.147.792.050,00
b.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp2.173.971.300,00
	Jumlah	Rp4.321.763.350,00
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp63.370.000,00
	Beban Honorarium	Rp42.120.000,00
	Beban Jasa Pengelolaan BMD	Rp21.250.000,00
	Jumlah	Rp63.370.000,00
	Jumlah Beban Pegawai	Rp9.699.479.478,00

3.1.7.1.2 Beban Barang dan Jasa Rp11.877.723.564,49 Rp15.131.193.155,36

Realisasi Beban Barang dan Jasa BPBD DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.877.723.564,49 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi
1.	Beban Barang	Rp4.893.151.924,49
2.	Beban Jasa	Rp5.018.248.049,00
3.	Beban Pemeliharaan	Rp647.683.870,00
4.	Beban Perjalanan Dinas	Rp1.318.639.721,00
6.	Beban Hibah	Rp1.112.147.000,00
	Jumlah	Rp12.989.870.609,49

Deviasi antara Laporan Operasional Beban Barang dan Jasa dengan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa	Beban Barang dan Jasa	Selisih
Rp11.196.763.847,00	Rp11.877.723.564,49	Rp(680.959.699,49)

- a. Selisih antara utang belanja sebesar Rp6.043.234,00
- b. Selisih antara persediaan sebesar Rp509.862.877,49
- c. Mutasi keluar persediaan sebesar Rp(42.686.252,00)
- d. Hibah masuk persediaan sebesar Rp937.428.984,00
- e. Reklas dari Beban Bantuan Sosial ke Beban Jasa Pengukuran Tanah sebesar Rp25.284.000,00

3.1.7.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp3.546.213.478,54 Rp6.738.372.976,10

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi BPBD DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.546.213.478,54 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp3.062.338.388,22
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp186.175.987,00
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp297.699.103,32
	Jumlah	Rp3.546.213.478,54

3.1.7.2 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional-LO Rp(25.298.134.537,03)

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional-LO sebesar Rp(25.298.134.537,03) berasal dari Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp937.428.984,00 dikurangi Beban sebesar Rp26.235.563.521,03.

3.1.8 Laporan Perubahan Ekuitas

Saldo Ekuitas sebesar Rp23.511.492.399,31 merupakan kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban SKPD pada tanggal 31 Desember 2023. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal Rp27.405.488.989,34 ditambah Surplus/Defisit-LO Rp(25.298.134.537,03), RK PPKD Rp21.446.824.199,00 dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp(42.686.252,00) seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
	Ekuitas awal	Rp27.405.488.989,34
	Surplus Defisit – LO	Rp(25.298.134.537,03)
	RK PPKD	Rp21.446.824.199,00
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp(42.686.252,00)
	Jumlah	Rp23.511.429.399,31

BAB IV PENUTUP

Laporan Keuangan BPBD DIY Tahun 2023 merupakan laporan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang selambat-lambatnya harus diterapkan pada Tahun 2015.

Laporan Keuangan BPBD DIY Tahun 2023 disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Untuk penyajian aset tetap di neraca didukung dengan SIM Aset.

Perencanaan anggaran BPBD DIY Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2023 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPBD DIY untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta, 16 April 2024

KEPALA PELAKSANA

Drs. NOVIAR RAHMAD, M. Si

NIP.197011161990031001

